

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdullah, Rozali. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemeilihan Kepala Daerah Secara Langsung Cet. Ke-1*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Ahman, Eeng. 2007. *Membina Kompetensi Ekonomi*. Bandung: Grafindo Media Pratama
- Andi, Rianto. 2004. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit
- Anshori, Lutfil. 2019. *Legal Drafting: Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*. Depok: Rajagrafindo Persada
- Ash-Shallabi, Ali Muhammad. 2017. *Negara Islam Modern: Menuju Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur*, terj. Ali Nurdin Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- B, M. Taufan. 2016. *Sosiologi Hukum Islam : Kajian Empirik Komunitas Sempalan*. Yogyakarta: Deepublish
- Bachtiar. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: UNPAM Press
- Butar-Butar, Elisabeth Nurhani. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Refika Aditama
- Damsar dan Indriyani. 2019. *Pengantar Sosiologi Pasar*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Goenadhi, Lydia dan Nobaiti. 2017. *Pengantar Ekonomi Mikro*. Banjarbaru: Scripta Cendikia
- Harahap, Nursapia. 2020. *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publishing
- Jupp, Victor. 2006. *The SAGE Dictionary of Sosial Research Methods*. London: SAGE Publications, 2006), hlm.157
- Kenedi, John. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- M, Sudikno. 1991. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) (3th ed)*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta

- Moenta, Andi Pengerang dan Syafa'at Anugrah Pradana. 2018. *Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Depok: Raja Grafindo Persada
- Nasional, Departemen Pendidikan. 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Poernomo, Bambang. 1983. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Rahardjo, Sajipto. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Remmelink, J. 2017. *Pengantar Hukum Pidana Material 3: Hukum Penitensier*, Yogyakarta: Maharsa
- Rukajat, Ajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish
- S, Laurensius Arliman. 2015. *Penegakkan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish
- Sandu, Siyoto. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing
- Soekanto, Soerjono. 2019. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Rajagrafindo Persada
- Sunggono, Bambang. 2002. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo
- Wahab. 2010. *Ensiklopedia Perdagangan Nasional*. Semarang: Alprin
- Wahyuningsih, Nur Utami dkk. 2020. *Buku Saku Ekonomi Berbasis Contextual Teaching and Learning (CTL)*. Makassar: Universitas Negeri Makassar
- Watkins, Dawn dan Mandy Burton. 2013. *Research Methods in Law*. Routledge: New York
- Yusuf dan Toet. 2012. *Indonesia Punya Cerita: Kebudayaan dan Kebiasaan Unik di Indonesia*. Jakarta: Cerdas Interaktif
- Zamzam, Fakhry. 2019. *Good Governance Sekretariat DPRD*. Yogyakarta: Deepublish

B. JURNAL

- Arik. 2021. *Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Di Kabupaten Asahan*. Jurnal Pionir LPPM 2021 Universitas Asahan

Sumatera Utara

- Asshiddiqie. Jimly. *Penegakan Hukum*, www.jimly.com, diakses pada 16 Desember 2022
- Astuti, Mardiah. Dkk. 2020. *Developing Regional Autonomy: Lesson Learned from Norway*. European Journal of Molecular & Clinical Medicine, Volume 07, Issue 01
- Borgman, Christine L. 2010. *Research Data: Who will share what, with whom, when, and why?* , German Data Forum (RatSWD) Federal Ministry of Education and Research. Working Paper No. 161 Oktober
- Gerring, John. 2004. *What Is a Case Study and What Is It Good for?*, Boston University. American Political Science Review Vol. 98 No. 2 May
- Hardiman, Didin M. 2016. *Asas Ultimum Remidium Dalam Penegakan Hukum Administrasi Perlindungan Dan pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol. 4 No. 2
- Komariah, Mamay. 2016. *Integritas Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, KPK) Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol. 4, No. 1
- Machmud, Syahrul. 2017. *Tindakan Preventif Dan Represif Non-Yustisial Penegakan Hukum Administrasi Oleh Eksekutif*, Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara Vol. 7 No. 2
- Prayitno, Suko. 2017. *Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori*, Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan Vol. 8, No. 2
- Purnawan, Kadek dan I Nyoman Surata. 2015. *Peranan Polisi Pamong Praja Sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Wilayah Kabupaten Buleleng*. Jurnal Hukum Vol.3 No.2. Universitas Panji Sakti Buleleng Bali
- Sanyoto. 2008. *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8, No. 3
- Saputra, Ferdi. 2020. *Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol. VIII, No.1
- Sodikin. 2017. *Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tata Ruang*. Jurnal Rechtsvinding Volume 6 Nomor 2 Agustus

- Syahputra, Azmi. 2015. *Fungsi dan Kedudukan Advokat Sebagai Penegak Hukum dan Penemu Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum Prioris Vol. 4, No. 3
- Zuber, Konar. 2017. *Peranan Lembaga Polri Dalam Penegakan Hukum*, Universitas Sriwijaya, Jurnal Unpal Vol. 5, No. 3

C. SKRIPSI

- Kusumawati, Adeliana. 2019. *Pelaksanaan Kewajiban Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil*. Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning Pekanbaru
- Nabila, Putri Eva. 2020. *Peran Satpol-PP Dan WH Kota Sabang Sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Penerapan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat*. Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban Dan Kesehatan Lingkungan
- Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 73 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tatakerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- Peraturan Walikota Nomor 129 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Satuan Polisi

Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Banjarmasin

E. INTERNET

<https://kbbi.kata.web.id/pasar-kaget/>

<https://kbbi.web.id/tungging>

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/06/24/19-titik-pasar-tungging->

<https://kbbi.web.id/polisi>

<https://kbbi.web.id/langgar>

<https://www.kompasiana.com/kaekaha.4277/5dbab483097f3631cc3bf432/>

<https://berita.banjarmasukota.go.id/pages/profil-kota>

<https://umum.banjarmasukota.go.id/2017/01/profil-kota-banjarmasin.html>